KOMUNIKASI POLITIK DAN PENGUATAN CIVIC LITERACY

Telaah Singkat Fenomena Relawan Politik Dalam Pilpres RI 2014

Oleh

M. Nurul Yamin
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
email ; moehyamien@umy.ac.id, moehyamien@yahoo.com
HP. 08121586516

Refleksi Historis

Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri sebagai peserta pemilu 1955. Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru sejak tahun 1966. Padal pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak. Tetapi pada pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar belum disebut sebagai partai politik, melainkan Golongan Karya saja.

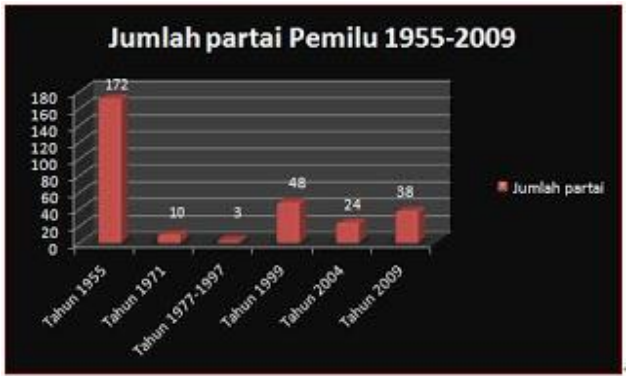

Grafik 1. Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 1955—2009

Pasca jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, kembali gegap gempita mewarnai euphoria kebebasan berekspresi. Paling tidak dapat dilihat dalam dua hal, yaitu kebebasan dalam berpolitik yang ditandai dengan lahirnya partai politik dan organisasi sosial kemasyarakat (ormas) bak jamur di musim hujan, dan kebebasan berekspresi melalui media massa dan media sosial. Bahkan euphoria kebebasan inipun terasa kebablasan dengan banyaknya muncul kasus-kasus kekerasan atas nama kebebasan itu sendiri baik di bidang politik, sosial, dan media.

Dalam bidang politik, pemilu 1999, sebagai pemilu pertama di era reformasi diikuti oleh 48 partai peserta pemilu, 24 partai bersaing dalam Pemilu 2004, 34 partai pada Pemilu 2009, dan 12 partai dalam Pemilu 2014. Demikian pula dengan pemilihan presiden/wakil presiden yang dilakukan secara langsung sejak pemilu 2004 telah memunculkan 5 pasang calon presiden/wakil presiden, pada pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2009 memunculkan 3 pasang calon, sedangkan pada pemilihan presiden/wakil presiden 2014 hanya diikuti oleh 2 pasang calon.

Sisi lain yang patut dicatat, selama kurun waktu 68 tahun Indonesia merdeka kita telah memiliki 6 orang presiden (akan segera yang ketujuh), Soekarno : 1945-1966, Soeharto : 1966-1998, BJ Habibie : 1998-1999, Abdurrahman Wahid : 1999-2001, Megawati: 2001-2004, Susilo Bambang Yudhoyono: 2004-2014. Selama Orde Lama (21 Th) melahirkan 1 orang pemimpin. Orde Baru (32 Th) melahirkan 1 orang pemimpin. Orde Reformasi (16 Th) melahirkan 4 orang pemimpin.

Pilpres 2014

Sebagai peristiwa komunikasi politik, pemilihan presiden tahun 2014 menarik untuk dicermati. Paling tidak ada lima alasan : *pertama,* pilpres kali ini hanya diikuti dua pasang calon dan hanya berlangsung satu putaran. Oleh karena itu masing-masing kandidat langsung *head to head* untuk memenangkan pilpres. *Kedua,* pilpres 2014 kali ini tidak ada *incumbent* atau petahana. Dengan demikian semua kandidat dalamm posisi merebut kekuasaan. Secara psikologi politik, suasana batin merebut kekuasaan akan meningkatkan adrenalin kekuasaan yang tinggi, bahkan kadang mendorong perilaku politik irasional. Munculnya kampanye hitam merupakan bukti ketegangan psikologi politik itu.

Ketiga, semiotika politik huruf “O”. Dalam politik kekuasaan Jawa, huruf “O” memiliki relasi kuasa yang kental. Nama presiden yang memiliki unsur huruf “O” memiliki masa jabatan lebih langgeng dibandingkan yang tidak memiliki unsur huruf “O”. Sebut saja misalnya, Soekarno (1945-1966), Soeharto (1966-1998), BJ. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Dari fakta tersebut nama presiden yang tidak memiliki unsur huruf “O” (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati) hanya menjabat kurang dari satu periode. Nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang memiliki unsur huruf “O” masing-masing berjumlah empat dan tiga, dipandang dari perspektif semiotika politik kekuasaan Jawa

sama-sama memiliki peluang untuk meningkatkan statusnya dari calon presiden menjadi presiden.

Keempat, banyaknya warga negara yang masuk ke gelanggang pertarungan pilpres secara intens sebagai relawan politik. Selama kampanye pilpres berlangsung, masyarakat kita terpolarisasi dan saling berhadap-hadapan karena perbedaan pilihan, terjadi adu argumentasi dan pemikiran bahkan tidak jarang diwarnai gesekan emosi, bahkan fisik yang membuat kohesifitas sosial kita sebagai bangsa terganggu.

Kelima, masifnya penggunaan sosial media sebagai jejaring politik publik. Merlyna Lim (2014), seorang ahli media digital di Kanada Carleton University, mengatakan bahwa keunggulan pendukung Jokowi melalui media online adalah lebih kreatif, sementara di kubu Prabowo lebih sistematis dan terorganisir untuk menyerang (al Jazeera.com). Katapedia, pusat penelitian sosial media sosial mencatat bahwa kemenangan pasangan Jokowi-JK telah terlihat dalam sepuluh hari terakhir sebelum pemilu. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla unggul dalam hitungan *share* di sosial media 770.491 kali dibandingkan dengan 709.294 kali untuk Prabowo Hatta Rajasa (2014). Juga *tagline* milih untuk Jokowi-Jusuf Kalla melalui hashtag “AkhirnyaMilihJokowi” telah menjadi trending topic.

Dari persoalan yang dikemukakan di atas, tulisan ini hanya akan menelaah fenomena hadirnya relawan politik dalam pilpres 2014. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana menjelaskan munculnya relawan politik ini bila dikaitkan dengan konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya peningkatan peran warga negara *(civic literacy)* ? Lantas, bagaimana pula kebijakan komunikasi politik yang dapat dilakukan oleh elit politik (baca: presiden) dalam menyikapi dinamika sosial politik yang terus bergerak secara *continum* ?

Komunikasi politik sebagai aktifitas praksis sosial

Dalam perspektif komunikasi politik dalam pilpres 2014 merupakan aktifitas praksis sosial. Konsep "praktis sosial" *(social practices)* merujuk pada pemikiran yang dikedepankan Anthony Giddens. Untuk memahami konsepsi perihal praksis sosial, terlebih dahulu mesti dipahami beberapa konsep kunci yang melatar belakanginya. Kata kunci yang mengemuka dalam pandangan Giddens tentang praksis sosial adalah "struktur" dan "agensi". Persoalan "struktur" dan "agensi" sebenarnya persoalan yang telah menghantui banyak sosiolog. Pada umumnya mereka akan terjerumus ke dalam "strukturalisme" (termasuk di dalamnya fungsionalisme) atau kedalam "intentionalisme". Dua ancangan yang telah

disebutkan diatas mengalami keterjerumusan. Marxisme terjerumus dalam "strukturalisme", dan pluralisme terjebak dalam "intensionalisme". Hubungan antara struktur dan agensi dipandang secara berat sebelah, jika bukan struktur maka yang ditekankan adalah agensi. Dengan demikian konsepsi yang berkembang adalah agensi menjadi korban struktur (strukturalisme), atau struktur mengalami "imperialisme subyek" (intentionalisme) (Wibowo, 2000:20).

Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan "struktur" adalah *"rules and resources"* yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan "agensi" (terjemahan harfiah Inggris: *agency)* adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa intervensi si individu. Giddens dipandang sebagai salah satu yang berhasil menghasilkan teori yang menghubungkan struktur dan agensi[1]. Dalam pandangannya, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul *dualisme* struktur-agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas *(duality),* dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti. Teori Giddens tentang strukturasi didasarkan pada premis bahwa (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440) :

"[....] *the constitution of agents and structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality ...the structureal properties of social systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize…the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day to-day enactment of social life"*

Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Giddens mengambil bahasa sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah, baik kosa kata maupun tata bahasanya. Keduanya adalah struktur (*rules*) yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai kosa kata dan tata bahasa, orang mampu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya tanpa batas. Dalam hal

[1] Selain Giddens, Piere Bourdieu juga melihat bahwa pandangan yang memisahkan agen dan struktur adalah semu. Kontradiksi antara keduanya semu, karena keduanya tidak terpisah dalam praktek sosial. Lewat konsepsi yang hampir mirip, Bourdieu menamakan 'struktur mental' untuk apa yang disebut Giddens sebagai 'skemata', dan menyebut 'habitus' untuk apa yang disebut Giddens sebagai 'kesadaran praktis'. Lihat B, HerryPrlyono (2002: 86). Berger & Luckmann (1990) Juga dikenal melakukan usaha yang serupa. Menurut Ritzer, integrasi struktur dan agensi lebih merujuk pada tradisi Eropa, sedangkan tradisl Amerika merujuk pada integrasi makro-mikro. Perihal perbedaan kedua tradisi ini, lihat Ritzer, (1996:420-425)

ini, struktur justru memampukan agensi. Seandainya ia tidak pernah mempelajari kosa kata dan tata bahasanya, ia akan tetap membisu. Pengertian struktur disini, sama sekali berbeda dengan yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Bahkan dalam pengertian Giddens, struktur sekaligus juga medium. Giddens mengkritik analisis sosial yang semata-mata mengutamakan struktur, sebagaimana yang lazim dalam pemikiran strukturalisme (de Saussure dan Levi-Straus) dan fungsionalisme (Parson), ataupun pemikiran sosial yang semata-mata mengutamakan agensi atau tindakan sosial individu sebagaimana lazim dalam pemikiran interaksionisme simbolik (Mead, Blumer, Goffman, dll). Menurutnya bukanlah dualisme antara struktur dan agensi, tetapi timbal balik antara keduanya (dualitas).

Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dan bukanlah merupakan totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam struktualisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami para fungsionalis. Dalam pengertian Giddens, agensi dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur.Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol: *"The more tightly-knit and inflexible the formal relations of authority within an organization, in fact, the more the possible openings for circumventing them"*.

Maka, menurut Giddens yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut "*social practices*". Menurut Giddens *"The basic domain of study of the social science, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actors nor the existence of any form of societal totality, but social practice ordered across space and time"* (Wibowo,2000:21). Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada *social practice*, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank, dll. Dalam proses ini, agensi tidak boleh dibayangkan sebagai manusia yang lemah, yang pasrah menerima nasib, melainkan sebagai manusia yang tahu dan paham akan liku-liku kehidupan. Semua tingkah lakunya selalu dimonitor agar cocok dengan norma dan kaidah. Tetapi tidak semua tingkah lakunya itu selalu harus disadari sepenuhnya.

Giddens membedakan 3 (tiga) dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) (Priyono, 2002: 28-31). Motivasi tak sadar (*unconscious motives*) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Diilustrasikan misalnya sangat jarang "tindakan" kita pergi ke tempat kerja digerakan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Berbeda dengan motivasi tak sadar, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Dengan kata lain terdapat sejumlah alasan bagi semua tindakan kita. Sedangkan kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai.

Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber "rasa aman ontologis" (*ontological security*). Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus terus menerus mempertanyakan apa yang terjadi atau yang mesti dilakukan.

Sejalan dengan tesis Berger yaitu *eksternalisasi*, kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang atau memampukan tindakan atau praktik sosial (Berger menyebutnya *internalisasi*)[2]. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan oleh aktor pelaku. Tapi apakah yang terjadi hanyalah reproduksi sosial dan tanpa perubahan ? Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah tipis, tidak seperti jarak antara kesadaran diskursif dengan motivasi tak sadar yang sedemikian jauh.

---

[2]Gagasan Giddens sesungguhnya mirip dengan pemikiran Berger. Menurut Berger terjadi proses dialektis antara struktur dan individu. Proses tersebut terjadi dalam tiga moment yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Giddens menyebut proses dialektis ini sebagai hubungan timbal balik yang terjadi dalam praktik sosial antara struktur dan agency, atau dualitas (*duality*). Uraian tentang dialektika dalam pembentukan realitas yang malibatkan modus objektivasl, internalisasi, dan eksternalisasi. Lihat Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990; dan Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1994

Dengan meminjam gagasan interaksionisme simbolik Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung "de-rutinisasi'. Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial yang baru. Apa yang kemudian terjadi adalah keusangan (*obsolence, obsoleteness*) struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru.

Pilpres 2014 ; Struktur Vs Agensi

Dalam konteks teoritis di atas, nampak bahwa pilpres 2014 ini dapat dilihat sebagai sebuah "pertempuran struktur vs agensi" yang di satu sisi mengutamakan struktur, sebagaimana yang lazim dalam pemikiran strukturalisme (de Saussure dan Levi-Straus) dan fungsionalisme (Parson), ataupun pemikiran sosial yang semata-mata mengutamakan agensi atau tindakan sosial individu sebagaimana lazim dalam pemikiran interaksionisme simbolik (Mead, Blumer, Goffman, dll).

Dalam konteks demikian pasangan Praboowo/Hatta dapat dilihat sebagai representasi strukturalis yang dapat diidentifikasi dalam beberapa hal : *Pertama,* dominasi elit. Keberadaan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan capres/cawapres tidak dapat dilepaskan dari posisi struktural keduanya sebagai elit partai. Prabowo Subianto adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sedangkan Hatta Rajasa adalah Ketua Umum PAN. Posisi struktural inilah sebagai modal utama keduanya bersanding sebagai capres/cawapres.

Kedua, rasional transaksional. Penopang utama pendekatan struktural adalah berfungsinya sistem yang bersifat mekanis untuk mencapai tujuan. Hanya saja untuk menggerakkan sistem tidak dapat dilepaskan dari motiv dan terpenuhinya kebutuhan masing-masing sub sistem tersebut. Munculnya opini publik akan aroma politik transaksional kekuasaan yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo/Hatta dalam merekut mitra koalisi seperti tawaran jabatan menteri khusus kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Kekuatan pendekatan struktural ini

mampu menjamin terciptanya stabilitas, akan tetapi kelemahannya dapat dimanipulasi oleh elit penguasa sehingga terjebak dalam “strukturalisme” yang dapat memunculkan rezim otoriter.

Sementara itu, pasangan Jokowi-JK merepresentasikan kekuatan agensi yang dapat dicermati pada hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, kekuatan aktor. Majunya Jokowi-JK sebagai pasangan capres/cawapres lebih dipengaruhi oleh kekuatan personality yang bersangkutan, karena keduanya bukanlah struktural di partai politik pengusung. Kemunculan keduanya merupakan gerakan budaya dari akar rumput yang menemukan formulanya melalui partai politik.

Kedua, humanis dan responsif. Pendekatan kultural yang dilakukan pasangan Jokowi-JK terasa lebih humanis dan responsif dalam menanggapi problematika yang muncul, karena kelekatannya dengan masyarakat sebagai ciri utama agensi. Kekuatan pendekatan agensi adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan publik, akan tetapi kelemahannya, dapat terjebak dalam “intensionalisme” dimana struktur terdesak oleh kekuatan sang aktor politik.

Komunikasi politik dan penguatan *civic literacy*

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik terus merosot. Hal itu terlihat dalam hasil survei Cirus Surveyor Group (Tribunnews.Com5/1/2014). Hasil survei memperlihatkan sebanyak 40 persen responden tidak percaya terhadap partai politik. Sedangkan 39,2 persen kurang percaya. Hanya 9,4 persen reponden yang percaya terhadap partai politik. Sementara 11,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu, parpol juga dinilai tidak menjalankan fungsinya. Sebanyak 75,4 persen responden menilai parpol tidak menjalankan penyuluhan mengenai demokrasi, pemerintahan dan pemilu. Kemudian sebanyak 75,1 persen responden melihat parpol tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja partai. Lalu 80,9 persen responden menilai parpol tidak melakukan kegiatan kaderasi dan perekrutan anggota baru parpol.Terakhir, sebanyak 74,8 persen responden menilai politisi sebagai corong parpol tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan secara berkala.

Diketahui, responden dalam survei ini penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan total 2.200 orang di 33 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui metode acak bertingkat. Kemudian dilakukan pengecekan lapangan sebanyak 15 persen dari total responden. Tingkat kepercayaan survei 95 persen

dengan margin of error sebesar 2,2 persen. Survei dilakukan dari 20 November-30 Desember 2013.

Survei tersebut menunjukkan hubungan antara partai politik dan masyarakat hambar. Kebersamaan di dalam makna antara politisi dan konstituen sulit diwujudkan. Ini terjadi karena apa yang dipikirkan oleh partai politik tidak simetris dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan publik. Melemahnya ikatan emosional terhadap partai politijk bukan fenomena khas Indonesia. Diamond Gunther (2001) mencatat penurunan partisanship (ikatan emosional warga terhadap partai politik) di negara-negara penganut demokrasi modern dalam 25 tahun terakhir. Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab penurunan tersebut adalah kinerja partai politik kurang memuaskan, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap politisi dan lembaga politik, serta dampak keterlibatan warga dalam politik *(political efficacy)* yang rendah.

Fenomena di atas mencuatkan beberapa kenyataan bahwa intensitas penyebaran pesan politik tidak diikuti peningkatan *civic literacy* sebagai elemen penting dalam membangun warga negara yang otonom. Juga, komunikasi politik yang digalang aktivis partai gagal membangun partisanship dan membentuk citra publik tetang politisi dan partai politik itu sendiri..

Dalam konteks demikian, munculnya fenomena relawan politik dalam pilpres 2014 mencerminkan pertumbuhan asosiasi sukarela dan saling percaya antarwarga yang merupakan elemen penting *social capital* bagi peningkatan *civic literacy*. C*ivic literacy* sering dihubungkan dengan partisipasi politik dan pengetahuan politik. Namun keduanya saling berkaitan. *Civic literacy* tidak lain adalah *the knowledge and ability capacity of citizens to make sense of their political world* (Milner, 2002). Dengan demikian *civic literacy* sebagai pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak secara otonom.

Melalui partisipasi politik setiap warga memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan ketrampilan dan informasi yang menjadi landasan partisipasinya, warga mengawasi pelaksanaan kebijakan bagi perbaikan masyarakatnya. Dalam konteks demikian, ide pemetintahan yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat akan mendekati kenyataan. Pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan *(civic literacy)* menjadi faktor penting bagi peningkatan kualitas keterwakilan dan demokrasi itu sendiri.

Bila selama ini budaya politik masih didominasi orientasi parokhialistik (sebuah pandangan pribadi terhadap dunia hanya didasarkan pada perspektif dan nilai-nilai sendiri. Pandangan ini tidak mengakui atau menghormati perspektif atau cara hidup lain), maka dengan pengetahuan politik yang memadai rakyat akan merasa mampu mengubah keadaan dan bertindak menurut cara-cara rasional-kalkulatif. Dengan partisipasi warga yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya. Dengan begitu masyarakat bukan saja memperoleh kepuasan atas keterlibatannya, tetapi juga makin membuka akses warga kepada sumber-sumber pendapatan sosial dan ekonomi. Keterbukaan semacam ini akan mendorong warga negara mengikuti informasi tentang pemerintah dan berbagai keputusan yang diambilnya. Kebutuhan semacam inilah yang memungkinkan warga memiliki ikatan emosional untuk turut serta memikirkan apa yang dipertimbangkan pemerintah bagi perwujudan kebaikan bersama.

Munculnya relawan politik dalam pilpres 2014 memberikan angin segar bagi proses pendidikan politik sebagai bagian dari upaya membangun *civic literacy* menjadi proses penting yang kini dilupakan oleh banyak partai politik di Indonesia. *Civic literacy* sebagai alat sekaligus tujuan dapat diperkuat oleh pilihan kebijakan yang salah satunya adalah menjaga kontak warga dengan berbagai lembaga politik yang disepakati secara langsung dapat meningkatkan *civic literacy.* Dalam konteks demikian, *civic literacy* bukan hanya dampak, ia juga penyebab. Tingkat *civic literacy* yang tinggi amat kondusif bagi pilihan kebijakan yang efisien.

Model komunikasi politik yang mengedepankan *civic literacy* ini sejalan dengan pemikiran sistem politik yang dikemukakan oleh Kousoulas. Menurut Kousoulas (1979:15), adalah sebuah agregat dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional, berinteraksi berdasarkan proses-proses yang dapat dikenal dan diramalkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Apabila pengertian sistem ini digabungkan dengan pengertian politik seperti telah dijelaskan di awal, maka diperoleh pengertian sistem komunikasi politik *civic literacy*, yaitu suatu agregat komponen-komponen berpotensi politis yang berhubungan secara fungsional, berinteraksi berdasarkan proses-proses yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Jadi, konsep sistem politik itu pada dasarnya menunjuk kepada seluruh lingkup aktivitas politik dalam suatu masyarakat.

Penutup dan agenda aksi : sebuah urun rembug

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa garis lurus sekaligus sebagai kesimpulan, dan masukan untuk terbangunnya sebuah agenda aksi komunikasi politik yang efektif, diantaranya adalah, *pertama*, bahwa komunikasi politik bukanlah sekedar sebagaimana didefinisikan oleh Lasswell (1958), yang menyatakan bahwa "politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana". Ataupun menurut David Easton menyebut "politik alokatif" *(allocative politics)* yakni alokasi otoritatif nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara keseluruhan(*World Politics*,IX ,1957; 383-400). Akan tetapi bagi seorang pemimpin komunikasi politik sebuah pemberdayaan *(empowering)* terhadap warga negara untuk sadar akan kewajiban dan hak-haknya melalui pengetahuan dan partisipasi politiknya secara maksimal sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat diraih sebagai sebuah karya besar bersama antara pemimpin dengan rakyatnya.

Model komunikasi *civic literacy* dapat digambarkan sebagai berikut :

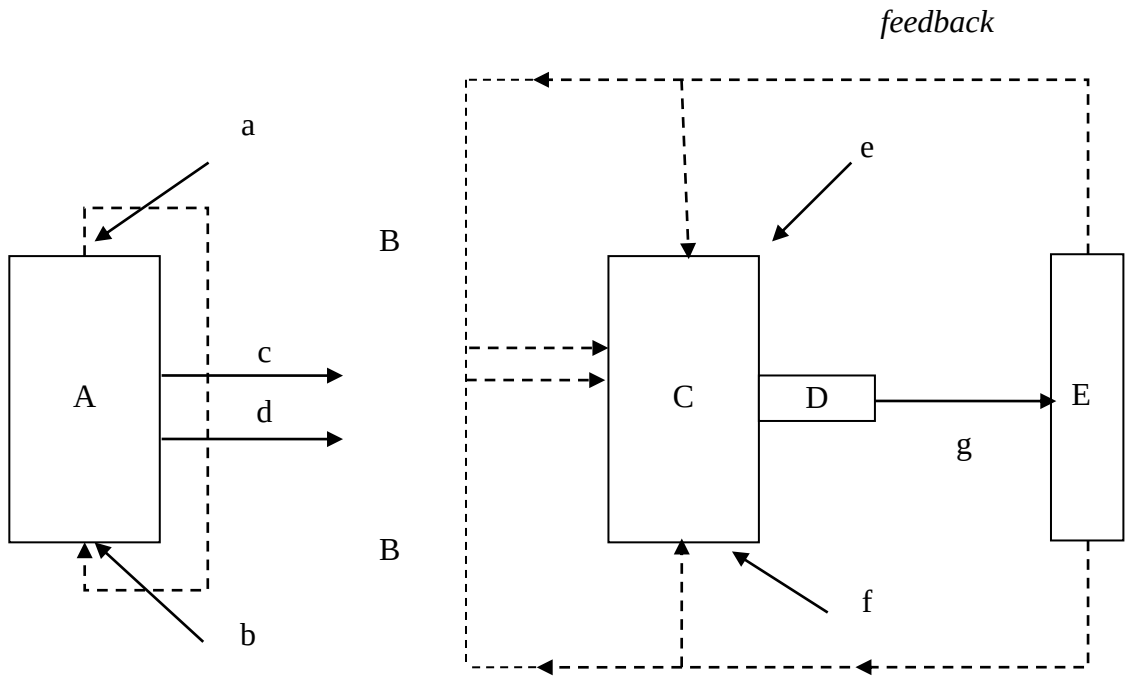

Gambar 1 : Model Komunikasi Politik Civic Literacy:
Sumber : Dikembangkan dari Kousoula, 1979: 23

Sistem: A=komanitas politik; B=saringan ideologi, nilai-nilai; C=otoritas politik; D=rezim dan tata-cara proses; E=implementasi. Input: a=kebutuhan, masalah; b=informasi,

kepentingan; c=tuntutan-tuntutan; d=dukungan dan keberatan; e=prioritas dan tujuan; f=informasi. Output: g=keputusan-keputusan dan aturan-aturan.

Model ini secara singkat dapat dijelaskan bahwa, semua anggota komunitas politik (A) memiliki kebutuhan dan masalah (a) serta informasi dan kepentingan (b) yang kemudian menjadi aspirasi berupa tuntutan (c) atau dukungan/keberatan (d). Aspirasi tadi disaring oleh ideologi dan nilai-nilai (B) yang berlaku dalam budaya politik. Penyaringan ini dapat menghasilkan *feedback* bagi komunitas politik untuk dilakukan proses ulang: direnungkan, dinegosiasi, dan diformulasikan kembali sehingga dapat diterima oleh otoritas politik (C). Otoritas politik kemudian mengolahnya dengan memanfaatkan informasi baru (f) serta "feedback" yang diperoleh dari implementasi sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan tujuan (e). Hasil pengolahannya disalurkan melalui rezim (D) yang menghasilkan keputusan-keputusan dan aturan-aturan (g) yang harus diimplementasikan (E) demi kepentingan komunitas politik (A).

Kedua, keberadaan relawan sebagai kekuatan *civil society* baru yang berbeda dengan mainstream *civil society* lainnya harus terus dikembangkan intereaksi dan interelasinya tanpa harus saling "intervensi" mengingat relawan politik memiliki "dunianya sendiri" sebagaimana politik memiliki karakteristik yang khas. Meski demikian sejarah pipres 2014 telah membuktikan bahwa keberadaan relawan politik merupakan aset politik yang harus selalu dipelihara kohesivitasnya.

Ketiga, perlu diperluas jangkauan relawan politik baik secara geografis maupun demografisnya, sehingga gerakan relawan politik merupakan gerakan arus bawah yang menaungi semua anak bangsa yang peduli terhadap problem negerinya.

Keempat, dari manajemen citra menuju manajemen aksi dan reputasi. Politik pencitraan yang selama ini melekat pada perilaku politik elit yang hanya mengedepankan terbangunnya persepsi politik yang positif, digantikan dengan manajemen aksi dan reputasi. Reputasi seorang pemimpin dibangun berdasarkan karya dan aksinya yang meski penuh tantangan dapat dirasakan secara kongkrit oleh masyarakat. Untuk hal ini pengelolaan informasi dan media baik media massa ataupun sosial media menjadi urgen dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Yogyakarta, 2 September 2014

Daftar Pustaka :

Anderson, B.R OG, 1972, *Java in a Time of Revolution : Occupation and Resistence, 1944-1946*, Ithaca, Cornelll University Press

Anderson, B. R. O'G. 1972. *"The Idea of Power in Javanese Culture"* in C. Rolt (Ed.) *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Berger, Peter L dan Thomas Luckman, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.* Terjemahan Hasan Basari,Jakarta:LP3ES.

Budiharjo, Miriam, 2000. *Dasar-Dasar Islam Politik*.Jakarta: Gramedia.

Blumer, Herbert,1969, Symbolic Interaction: perspective and Method, Englewood Cliffs,NJ.Pretince-Hall.

Carey, James W, 1988, *Communication as Culture, Essay on Media and Soeciety*, Boston, Unwin Hyman.

Charles F Andarin, 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, tejemahan Yogyakarta; Tiara Wacana.

Dahl, Robert, 1963, *Modern Political Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

David, VJ Bell, 1975, *Influence and Authority*, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

David E Apter, 1985, *Pengantar Analisa Politik*, terjemahan. Jakarta:LP3ES.

David Easton, 1957, *An Approach to the Analyses of Political System"* 383-400, *dalam World Politics, IX* (1957).

Diamond, Larry & Richard Gunther, 2000, Political Parties band democracy, Baltimore and London : The John Hopkins University Press.

De Fluer, Melvin L, 1970, *Theories of Mass Communication*, 2nd edition, New York: David McKay.

Giddens, Anthony. 2000. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, terjemahan. Jakarta :Gramedia

----------, 1994, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Cambridge, Polity Press

Hidayat, Denny, N, 1999, *Paradigma dan Peerkembangan penelitian Komunikasi*" Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol III/April 1999 Jakarta IKSI dan Rosda.

Kousoulas, D George, 1979, *On Goverment and Politics*. Massachusetts: Duxbury Press.

Lasswell, Harold, 1958, *Politic: Who Gets What, When, How.* New York: Meridian Books.

Milner, Henry, 2002, *Civic Literacy: How Informed Citizens make Democracy Work*, Tufts University : University Press of New England

Priyono,Herry, 2002, *Anthony Giddens : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia,